



KPP PRATAMA-PEMKOT JALIN KERJA SAMA

Pengusaha Tak Bisa Hindari Pajak

YOGYA (KR) - Pengusaha di Kota Yogyakarta kini tidak akan memiliki celah untuk menghindari perpajakan. Pasalnya, Pemkot Yogyakarta bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta resmi menjalin kerja sama dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu bentuknya ialah penyerahan data seluruh usaha yang beroperasi di Kota Yogyakarta dari pemkot ke KPP Pratama.

"Sebenarnya ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang sudah dibangun sejak 2014 lalu. Namun kami perkuat kembali supaya lebih fokus untuk menggenjot penerimaan pajak," ungkap Kepala KPP Pratama Yogyakarta, R Soleh Abdurrahman di sela penandatanganan kerja sama di kompleks Balaikota, Selasa (29/3).

Sesuai dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31/2012, diamanatkan bagi setiap instansi pemerintah maupun asosiasi untuk memberikan data setiap usaha-usaha yang dijalankan di area masing-masing. Data tersebut sangat dibutuhkan kaitannya dalam proses intensifikasi maupun ekstensifikasi wajib pajak.

Soleh menambahkan, total pengusaha di Kota Yogyakarta yang tercatat sebagai wajib pajak mencapai sekitar 23 ribu orang. Namun dari jumlah tersebut baru sekitar 10 ribu wajib pajak yang sudah menyetorkan pajak. Sehingga, jika data perpajakan dari sektor pengusaha bisa diketahui secara valid, maka secara otomatis penerimaan pajak akan meningkat.

"Seperti halnya realisasi pajak perorangan pada 2015 lalu mencapai Rp 50 miliar. Padahal, pada 2014 sumbangsinya hanya Rp 16 miliar. Lonjakan ini berkat proses intensifikasi dan ekstensifikasi. Setelah ada kerja sama ini, maka kami optimis bisa lebih besar lagi," urainya.

Selain itu, guna mempermudah pelayanan perpajakan bagi pengusaha maupun calon investor di Kota Yogyakarta, pemkot juga akan menyediakan konter khusus bagi petugas KPP Pratama. Hal itu juga diatur dalam jalinan kerja sama yang kemarin dijalin.

Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengaku, pajak sudah menjadi kewajiban setiap orang, bukan hanya bagi pengusaha maupun pegawai. Oleh karena itu, upaya optimalisasi yang kini digencarkan pun bukan untuk sekadar mencari-cari melainkan sudah diatur oleh undang-undang.

Dengan demikian, pihaknya meminta semua pihak agar tertib dalam membayar sekaligus melaporkan pajaknya. Apalagi, pajak yang disetorkan tersebut langsung diterima negara dan dikembalikan lagi dalam bentuk program pembangunan.

"Kami akan berikan data usaha online di Kota Yogyakarta yang sekarang tengah berkembang pesat namun sulit didata untuk perpajakan," tandanya. (Dhi)-

KR-Ardhi Wahdan

Penandatanganan kerja sama Pemkot Yogyakarta dengan KPP Pratama.

☐ Netral ☐ Biasa ☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005